

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Perilaku Organisasi**

Apabila kita membicarakan perilaku manusia, berarti kita memandang organisasi itu sebagai proses, yaitu proses kerjasama antara sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila kita membicarakan perilaku organisasi, bukan berarti organisasi itu yang berperilaku tampak secara nyata. Yang mempunyai perilaku adalah para individu, para anggota (baik secara individu maupun secara kelompok) yang ada di dalam organisasi. Perilaku dari para anggota organisasi secara keseluruhan akan memberi warna, ciri dan tipe sari situasi organisasi, bagaimana organisasi itu bergerak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Wursanto: 2005, 275)

Oleh karena itu mempelajari perilaku organisasi berarti mempelajari perilaku para anggota organisasi, baik secara individu maupun kelompok. Mempelajari perilaku organisasi bukan mempelajari bagaimana organisasi itu berperilaku, tetapi mempelajari mempelajari bagaimana para anggota organisasi berperilaku berarti berusaha memahami perilaku manusia. Memahami perilaku manusia adalah suatu hal yang sulit karena setiap manusia sebagai individu mempunyai perilaku berbeda-beda. Demikian pula perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor; antara lain faktor lingkungan, latar belakang dan sebagainya. Dengan demikian perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar.

1. Perilaku intern, adalah perilaku-perilaku yang dipengaruhi oleh faktor genetika, yaitu segala hal yang dibawa sejak orang itu lahir sehingga merupakan warisan dari orang tuanya.
2. Perilaku ektern, adalah perilaku yang dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya faktor lingkungan. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan ialah segenap situasi dan kondisi yang dihadapi sehari-hari oleh seseorang dalam hidupnya. (*Ibid* : 2005,275)

Dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi adalah studi tentang apa yang dilakukan orang-orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja organisasi. (Syamsir Torang; 2012, 112)

Oleh karena itu di dalam organisasi terdapat orang-orang yang bekerja sama, maka secara otomatis organisasi tidak dapat dipisahkan dengan ‘perilaku’ orang-orang yang melakukan aktivitas di dalam organisasi dalam mereka mencapai tujuannya. (*Ibid*: 2012, 112)

Perilaku organisasi (sering disingkat sebagai OB) adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak perseorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut demi perbaikan efektivitas organisasi. (Khaerul Umam: 2010, 30)

### **2.1.1 Iklim Organisasi**

Iklim atau *Climmate* berasal dari bahasa Yunani yaitu *incline*, kata ini tidak hanya memberikan arti yang terbatas pada hal-hal fisik saja seperti

temperatur atau tekanan, tetapi juga memiliki arti psikologis bahwa orang-orang yang berada di dalam organisasi menggambarkan tentang lingkungan internal organisasi tersebut. (wirawan; 2007, 121)

Istilah iklim organisasi (*organizational climate*) pertama kali dipakai oleh Kurt Lewin pada tahun 1930-an, yang menggunakan istilah iklim psikologi (*psychological climate*). Kemudian istilah iklim organisasi dipakai oleh R. Tagiuri dan G. Litwin. Tiaguri mengemukakan sejumlah istilah untuk melukiskan perilaku dalam hubungan dengan latar atau tempat (*setting*) dimana perilaku muncul: lingkungan (*environment*), lingkungan pergaulan (*milieu*), budaya (*culture*), suasana (*atmosphere*), situasi (*situation*), pola lapangan (*field setting*), pola perilaku (*behavior setting*) dan kondisi (*conditions*).

Definisi mengenai iklim organisasi dikemukakan oleh beberapa ahli. Para ahli Barat mengartikan iklim sebagai unsur fisik, dimana iklim sebagai suatu atribusi dari organisasi atau sebagai suatu atribusi daripada persepsi individu sendiri. Menurut Tagiuri dan Litwin, iklim organisasi merupakan kualitas lingkungan internal organisasi yang secara terus berlangsung, dialami oleh anggota organisasi; mempengaruhi perilaku mereka dan dapat dilukiskan dalam pengertian satu set karakteristik atau sifat organisasi. (Wirawan: 2007, 121)

### **2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Iklim Organisasi**

Lingkungan Eksternal. Industri atau bisnis yang sama mempunyai iklim organisasi umum yang sama. Misalnya, iklim organisasi umum perusahaan asuransi umumnya sama, demikian juga dengan iklim organisasi pemerintah, sekolah dasar, atau perusahaan industri minyak kelapa sawit di Indonesia, mempunyai iklim umum yang sama. Kesamaan faktor umum tersebut disebabkan pengaruh lingkungan eksternal organisasi.

Strategi Organisasi. Kinerja suatu perusahaan bergantung pada strategi (apa yang diupayakan untuk dilakukan), energi yang dimiliki oleh karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan oleh strategi, dan faktor-faktor lingkungan penentu dari level energi tersebut. Strategi yang berbeda menimbulkan pola iklim organisasi yang berbeda. Strategi mempengaruhi iklim organisasi secara tidak langsung.

Pengaturan organisasi. Pengaturan organisasi mempunyai pengaruh paling kuat terhadap iklim organisasi. Menurut Stringer (2002), banyak sekolah menengah di Amerika Serikat yang menjadi contoh baik bagaimana pengaturan organisasi menentukan iklim organisasi.

Kekuatan Sejarah. Semakin tua umur suatu organisasi semakin kuat pengaruh kekuatan sejarahnya. Pengaruh tersebut dalam bentuk tradisi dan ingatan yang membentuk harapan anggota organisasi dan mempunyai pengaruh terhadap iklim organisasinya.

Kepemimpinan. Perilaku pemimpin mempengaruhi iklim organisasi yang kemudian mendorong motivasi karyawan. Motivasi karyawan merupakan pendorong utama terjadinya kinerja. (Wirawan; 2007, 135)

### **2.1.3 Dimensi Iklim Organisasi**

Iklim organisasi yang dirasakan individu secara positif (menyenangkan) akan memberikan tampilan kerja yang baik dan efektif yang akan mempengaruhi pada keberhasilan organisasi. Iklim organisasi terjadi di setiap organisasi dan akan mempengaruhi perilaku organisasi dan diukur melalui persepsi setiap anggota organisasi.

Kemudian Robert Stringer (2002) berpendapat bahwa karakteristik atau dimensi iklim organisasi mempengaruhi motivasi anggota organisasi untuk berperilaku tertentu. Oleh karena itu, iklim organisasi dapat dilukiskan dan diukur dalam pengertian dimensi yang diperlukan.

1. **Struktur.** Struktur (*structure*) organisasi merefleksikan perasaan diorganisasi secara baik dan mempunyai peran dan tanggung jawab yang jelas dalam lingkungan organisasi. Struktur tinggi jika anggota organisasi merasa pekerjaan mereka didefinisikan secara baik. Struktur rendah jika merasa tidak ada kejelasan mengenai siapa yang melakukan tugas dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
2. **Standar-standar.** Standar-standar (*standards*) dalam suatu organisasi mengukur perasaan tekanan untuk meningkatkan kinerja dan derajat kebanggaan yang dimiliki oleh anggota organisasi dalam melakukan

pekerjaan dengan baik. Standar-standar tinggi artinya anggota organisasi selalu berupaya mencari jalan untuk meningkatkan kinerja. Standar-standar rendah merefleksikan harapan yang lebih rendah untuk kinerja.

3. **Tanggung jawab.** Tanggung jawab (*responsibility*) merefleksikan perasaan karyawan bahwa mereka menjadi “bos diri sendiri” dan tidak memerlukan keputusannya dilegitimasi oleh anggota organisasi lainnya. Persepsi tanggung jawab tinggi menunjukkan bahwa anggota organisasi merasa didorong untuk memecahkan problemnya sendiri. Tanggung jawab rendah menunjukkan bahwa pengambilan risiko dan percobaan terhadap pendekatan baru tidak diharapkan.
4. **Penghargaan.** Penghargaan (*recognition*) mengindikasikan bahwa anggota organisasi merasa dihargai jika mereka dapat menyelesaikan tugas secara baik. Penghargaan merupakan ukuran penghargaan dihadapkan dengan kritik dan hukuman atas penyelesaian pekerjaan.
5. **Dukungan.** Dukungan (*support*) merefleksikan perasaan percaya dan saling mendukung yang terus berlangsung di antara anggota kelompok kerja.
6. **Komitmen.** Komitmen (*commitment*) merefleksikan perasaan bangga anggota terhadap organisasinya dan derajat kelayakan terhadap pencapaian tujuan organisasi. (Wirawan; 2007, 131)

## **2.2 Lingkungan Hidup**

### **2.2.1 Lingkungan**

Menurut Juli Soemirat (2010:87) yang dimaksud dengan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada diluar host, baik benda tidak hidup, benda hidup, nyata atau abstrak, seperti suasana yang terbentuk akibat interaksi semua elemen-elemen tersebut, termasuk host lain. Host merupakan manusia.

St. Munajat Danusaputra dalam Nana (2013) : Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Secara etika lingkungan, manusia terhadap lingkungan mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab yang terbesar di antara makhluk lainnya. Untuk itu, manusia dapat bersikap transendental terhadap lingkungan hidupnya. Salim (1986:109), menyatakan bahwa hakikat masalah lingkungan hidup adalah memelihara hubungan serasi antara manusia dengan lingkungannya. Untuk keserasian salah satu acuannya digunakan etika lingkungan seperti yang di kemukakan Nugroho (1985):

- a. *Egoisme*, yang berdasarkan keakuan, tetapi selama ia sadar akan ketergantungannya kepada pengada lain, maka sifat egoismenya dapat berperan serta dalam pengelolaan lingkungan;
- b. *Humanisme*, solidaritas kepada sesama manusia;

- c. *Vitalisme*, kesetiakawanan terhadap sesama makhluk hidup, baik berpapasan, seperti hewan (*sentimentisme*) maupun kepada yang tidak berperasaan seperti tumbuhan;
- d. *Altruisme*, tingkatan terakhir yakni solidaritas kepada sesama pengada ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta di bumi ini karena ketergantungannya (manusia) kepada sesama yang ada, baik yang hidup maupun yang mati.

Menurut Lynton Keith Caldwell dalam *Environment: A Challenge for Modern Society* (*The American Museum of Natural History Press, NY 1970*), lingkungan adalah keseluruhan yang mengitari, termasuk yang dikitari yaitu manusia yang bersangkutan. (Ndraha; 2010, 12)

### **2.2.2 Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati (Tresna Sastrawijaya, 2009:7).

Emil Salim dalam Nana (2013) : Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Otto Soemarwoto dalam Nana (2013) : Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.



Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup lainnya (Lita Darmayanti, 2011 : 16).

### **2.3 Kebijakan Publik**

Kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “*Polis*” yang artinya kota (*city*). Dapat ditambahkan, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. (Syafaruddin, 2008, 75)

Abidin (2006:17) dalam Syafaruddin 2008:75 menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Gamage dan Pang (2003:171), kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksana program. (Syafaruddin, 2008, 75)

Menurut Nichols (1977:8), kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. (Syafaruddin, 2008, 76)

Bogue dan Saunders (1976:128) menyimpulkan, kebijakan adalah menjelaskan sasaran umum organisasi yang berisikan alasan bagi eksistensi dan menyediakan arah pembuatan keputusan bagi pencapaian sasaran.

Klein dan Murphy, (1973:2), kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. (Syafaruddin, 2008, 76)

Menurut Amara Raksasataya mengemukakan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu :

- 1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
- 2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- 3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Menurut Irfan Islami memberikan pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanaka atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan pubik, untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

Sementara itu, kepentingan publik atau masalah-masalah publik sangat banyak. Masalah-masalah publik dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama seperti yang diungkapkan oleh Theodore Lowe (Winarno,2002) adalah bahwa masalah publik dapat dibedakan ke dalam masalah prosedural dan masalah substantif. Masalah prosedural berhubungan dengan bagaimana pemerintah mengorganisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya, sedangkan masalah substantif berkaitan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia, seperti menyangkut kebebasan berbicara, maupun polusi lingkungan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan para manajer dan personel dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat. Itu berarti, keputusan yang disebut kebijakan adalah keputusan strategis.

## **2.4 Pendidikan**

Pendidikan menurut pengertian Yunani adalah *paedagogie* yang berarti “pendidikan”, serta *paedagogia* yang berarti “pergaulan dengan anak”. Konsep pendidikan tersebut kemudian dapat dimaknai sebagai usaha yang dilakukan orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk membimbing atau memimpin perkembangan jasmani dan rohaniyah kearah kedewasaan. Grene mendefinisikan pendidikan dengan usaha manusia untuk

menyiapkan dirinya untuk suatu kehidupan bermakna. Secara singkat, dari berbagai definisi tersebut, pendidikan dapat dirumuskan sebagai tuntunan pertumbuhan manusia sejak lahir hingga tercapai kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi dengan alam dan lingkungan masyarakatnya. (Nanang Martono; 2012, 195)

Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu (Redja Mudharjo, 2001 : 30).

Pendidikan itu proses perubahan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Sofyan Anwar, 2010: 73).

Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. (Damsar; 2011, 11)

#### **2.4.1 Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap system nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga perencanaan umum panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan yang

legal -netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat.

#### **2.4.1.1 Karakteristik Kebijakan Pendidikan**

Guna meningkatkan Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:

1. Memiliki tujuan pendidikan.

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

2. Memenuhi aspek legal-formal.

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

3. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas

pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

4. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

5. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindak lanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi secara mudah dan efektif.

6. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar

pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya, serta daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

#### **2.4.1.2 Tujuan Kebijakan Pendidikan**

**Tujuan Pendidikan (*Kemdiknas*):** "Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

John Dewey, pakar pendidikan dan filosof, merumuskan pendidikan secara pragmatis ialah "*education to promote growth*". Apabila tujuan pendidikan adalah untuk menunjang pertumbuhan peserta-didik, maka proses pendidikan ialah suatu proses untuk memperoleh kemampuan dan kebiasaan berpikir sebagai suatu kegiatan yang inteligen atau yang ilmiah dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan. (Tilaar; 2002, 130)

### **2.5 Program Adiwiyata**

Kata adiwiyata berasal dari bahasa Sansekerta yaitu adi dan wiyata. Adi bermakna besar, agung, baik, ideal atau sempurna sedangkan wiyata bermakna

tempat di mana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma dan etika dalam berkehidupan sosial. Bila kedua kata tersebut digabungkan menjadi adiwiyata mempunyai makna yaitu tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan.

Tujuan program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah. Diharapkan dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggungjawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan utama program Adiwiyata adalah mewujudkan kelembagaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Untuk mengembangkan program dan kegiatan dalam program Adiwiyata harus berdasarkan norma-norma dasar dan berkehidupan. Norma dasar program Adiwiyata meliputi kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program Adiwiyata yaitu partisipasif dan berkelanjutan. Partisipatif yang dimaksud yaitu komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah. Manajemen sekolah ini meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran masing-masing warga sekolah.



Sedangkan yang dimaksud dengan berkelanjutan yaitu seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif. Program Adiwiyata merupakan program yang dibuat untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Sekolah sebagai lembaga juga memiliki keuntungan apabila mengikuti program Adiwiyata, keuntungan tersebut yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya dan energi.
2. Mendukung percepatan pencapaian 8 standar Nasional Pendidikan (isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan biaya, dan penilaian) sebagaimana diatur dalam PP No.19 tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif .
4. Menjadi tempat pembelajaran tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar.
5. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan di sekolah.

### **2.5.1 Pelaksanaan Program Adiwiyata**

Pelaksanaan program Adiwiyata terdiri dari tim nasional, propinsi, kabupaten/kota dan tim sekolah. Unsur dan peran masing-masing tim seperti tercantum dibawah ini;

#### **1. Tim Nasional**

Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut: Kementerian Lingkungan Hidup (Koordinator), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Agama, LSM Pendidikan Lingkungan, Perguruan Tinggi, Media serta Swasta. Tim tingkat Nasional ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup.

Peran dan tugas pokok dari tim nasional adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kebijakan, program, panduan, materi pembinaan dan instrumen observasi;
- b. Melakukan Koordinasi dengan Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) dan Propinsi;
- c. Melakukan Sosialisasi program dengan Propinsi;
- d. Melakukan Bimbingan teknis kepada Tim Propinsi dalam rangka pembinaan sekolah;
- e. Menetapkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat nasional;
- f. Melakukan Evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan program Adiwiyata kepada Menteri Lingkungan Hidup tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

## 2. Tim Propinsi

Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut: Badan Lingkungan Hidup Propinsi (Koordinator), Dinas Pendidikan, Kanwil Agama, LSM Pendidikan Lingkungan, Media Massa, Perguruan Tinggi serta Swasta. Tim Propinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur.

Peran dan tugas pokok dari tim nasional adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan program Adiwiyata tingkat Propinsi;
- b. Koordinasi dengan kabupaten/kota;
- c. Melakukan Sosialisasi program dengan kabupaten/kota;
- d. Bimbingan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pembinaan sekolah;
- e. Membuat Pilot project 4 satuan pendidikan yang berbeda (SD, SMP, SMA, SMK) setiap propinsi;
- f. Menetapkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Propinsi;
- g. Melakukan Evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan program Adiwiyata kepada Gubernur tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup

## 3. Tim Kabupaten/Kota

Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Koordinator), Dinas Pendidikan, Kantor Agama, LSM Pendidikan Lingkungan, Media Massa, Perguruan Tinggi, Swasta sekolah Adiwiyata Mandiri. Tim Kabupaten ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Peran dan tugas pokok dari tim nasional adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan/melaksanakan program Adiwiyata tingkat Kabupaten/Kota
- b. Sosialisasi program Adiwiyata kepada sekolah
- c. Bimbingan teknis kepada sekolah
- d. Membuat Pilot project 4 satuan pendidikan yang berbeda (SD, SMP, SMA, SMK) setiap Kabupaten/Kota
- e. Menetapkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten/Kota
- f. Melakukan Evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan program Adiwiyata kepada Bupati/Walikota kepada Badan Lingkungan Hidup Propinsi.

#### 4. Tim Sekolah

Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut: guru, siswa, dan komite sekolah. Tim sekolah ditetapkan melalui SK Kepala Sekolah

Peran dan tugas pokok dari tim nasional adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji kondisi lingkungan hidup sekolah, kebijakan sekolah, kurikulum sekolah, kegiatan sekolah, dan sarana dan prasarana
- b. Membuat rencana kerja dan mengalokasikan anggaran sekolah berdasarkan hasil kajian tersebut diatas, dan disesuaikan dengan komponen, standar, dan implementasi adiwiyata
- c. Melaksanakan rencana kerja sekolah
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi

- e. Menyampaikan laporan kepada Kepala Sekolah tembusan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

## **2.5.2 Komponen dan Standar Adiwiyata**

### **A. Kebijakan Berwawasan Lingkungan**

1. KTSP memuat kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - a. Visi, misi, dan tujuan sekolah yang tertuang dalam KTSP memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - b. Struktur kurikulum memuat mata pelajaran wajib, muatan lokal, pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - c. Mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilengkapi dengan Ketuntasan minimal belajar
2. RKAS memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - a. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah,

peran masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu

## B. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan

### 1. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup

- a. Menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran
- b. Mengembangkan isu lokal dan / atau isu global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup sesuai dengan jenjang pendidikan
- c. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran lingkungan hidup
- d. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di luar kelas
- e. Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran lingkungan hidup
- f. Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup
- g. Mengakaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam pemecahan masalah lingkungan hidup, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

2. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- a. Menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Menerapkan pengetahuan lingkungan hidup yang diperoleh untuk memecahkan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari
- c. Mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup dengan berbagai cara dan media

C. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif

1. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah

- a. Memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh warga sekolah
- b. Memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- c. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- d. Adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- e. Mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar
2. Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak antara lain : orang tua, alumni, komite sekolah, LSM, media, dunia usaha, konsultan, instansi pemerintah daerah terkait, sekolah lain, dll
  - a. Memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup
  - b. Mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - c. Meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan untuk pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - d. Menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup
  - e. Memberikan dukungan kepada masyarakat, atau sekolah lain untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

#### D. Pengelolaan sarana dan prasarana ramah lingkungan

1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan hidup
  - a. Menyediakan sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah



- b. Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran lingkungan hidup di sekolah
- 2. Peningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan
  - a. Memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan
  - b. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah
  - c. Memanfaatkan listrik, air, dan alat tulis kantor secara efisien
  - d. Meningkatkan kualitas layanan kantin sehat dan ramah lingkungan

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Yeni Isnaeni dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan di SMP Negeri 3 Gresik”*** menunjukkan hasil penelitian: 1) implementasi kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan di SMP Negeri 3 Gresik sudah menunjukkan kebijakan yang tertuang dalam bentuk S.K kepala sekolah tentang mata pelajaran dan pengembangan diri yang terintegrasi dengan PLH dan PBK; 2) Faktor pendukung implementasi kebijakan adalah seluruh komponen warga mendukung; 3) SMP Negeri 3 sebagai juara sekolah Adiwiyata tingkat Nasional di tahun 2011, merupakan dampak yang sangat

positif, selain itu dampak langsung adalah adanya kesadaran warga sekolah untuk menjaga lingkungan hidup dan merawatnya dengan kesadaran yang baik.

Khairi Bintani (06104241004) dengan judul skripsi “*Peranan Warga Sekolah dalam Menyukkseskan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Sekolah Adiwiyata) di SMP Negeri 2 Ciamis*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepala sekolah yaitu sebagai pencetus ide utama, pembuat kebijakan yang pro lingkungan, menumbuhkan rasa percaya diri dan menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah.

## **2.7 Defenisi Konsep**

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Perilaku Organisasi adalah mempelajari perilaku organisasi berarti mempelajari perilaku para anggota organisasi.
2. Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati
3. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanaka atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

4. Kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan yang legal -netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat.

## 2.8 Konsep Operasional

Menurut Cholid Narbuko (2010:412) konsep adalah unsur pokok daripada penelitian. Penentuan dan perincian konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang terpilih perlu ditegaskan, agar tidak terjadi salah pengertian mengenai konsep tersebut. Tetapi perlu diperhatikan, karena konsep merupakan hal yang abstrak, maka perlu diterjemahkan dalam kata-kata sedemikian rupa, sehingga dapat diukur secara empiris.

Konsep Operasional juga merupakan suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari variabel tersebut (Oktavia Yeni, 2013:36).

**Tabel. 2.4 Konsep Operasional**

No.	Variabel Penelitian	Indikator
1.	Keadaan Lingkungan Kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tempat kerja</li><li>- Mebel</li><li>- Alat produksi dan sebagainya</li></ul>
2.	Keadaan Lingkungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hubungan atasan dan bawahan</li><li>- Hubungan antarteman sekerja</li><li>- Sistem komunikasi</li><li>- Sistem kepemimpinan</li><li>- Kebersamaan</li><li>- Kerja sama dalam melaksanakan tugas</li></ul>
3.	Pelaksanaan Sistem	<ul style="list-style-type: none"><li>- Visi, misi, dan strategi</li></ul>

	Manajemen	<p>organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakteristik organisasi</li> <li>- Struktur organisasi</li> <li>- Distribusi kekuasaan</li> <li>- Delegasi kekuasaan/otonomi</li> <li>- Proses pengambilan keputusan</li> <li>- Standar kerja</li> <li>- Prosedur kerja</li> <li>- Karakteristik peran</li> <li>- Pengembangan karir</li> </ul>
4.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses produksi</li> <li>- Jenis barang dan prosedur layanan konsumen</li> <li>- Jenis jasa dan prosedur penyajiannya</li> </ul>
5.	Konsumen, Klien, Dan Nasabah Yang Dilayani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis konsumen</li> <li>- Perilaku konsumen</li> <li>- Hubungan anggota organisasi dengan konsumen</li> <li>- Sistem layanan</li> </ul>
6.	Budaya Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan norma</li> <li>- Pelaksanaan kode etik</li> <li>- Pelaksanaan seremoni</li> <li>- Sejarah organisasi</li> </ul>

## 2.9 Kerangka Pemikiran

